

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016a). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016b). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (B. A. Saebani (ed.)). Pustaka Setia.
- Arofah, M. (2019). *IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 (STUDI KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI)* [UIN Sulthan Thaha Saifuddin].  
[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/nprt/lt51ee0be8ae3f6/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-no-9-tahun-2006-dan-no-8-tahun-2006-pedoman-pelaksanaan-tugas-kepala-daerah\\_wakil-kepala-daerah-dalam-pemeliharaan-kerukunan-u](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24645/nprt/lt51ee0be8ae3f6/peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri-no-9-tahun-2006-dan-no-8-tahun-2006-pedoman-pelaksanaan-tugas-kepala-daerah_wakil-kepala-daerah-dalam-pemeliharaan-kerukunan-u)
- Bryson, J., & Humphrey, H. (2004). *What to do when stakeholders matter: A guide to stakeholder identification and analysis techniques*.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Crouch, M. (2013). REGULATING PLACES OF WORSHIP IN INDONESIA : UPHOLDING FREEDOM OF RELIGION FOR RELIGIOUS MINORITIES ? *Singapore Journal of Legal Studies*, July 2007, 96–116.
- Dachlan, M. (2015). Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu di Kota Palopo. *Jurnal Smart*, 1(1), 69–81.
- Djafar, A. M., Yonesta, F., Hafiz, M., Isnur, M., Subhi, M., & Rumadi, A. (2016). *Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Elfiandri, E., Perdamaian, P., & Rahmi, F. (2015). *Pemahaman Pemuka Agama (Kognisi, Afeksi, Konasi), Sumber Daya Manusia Pemuka Agama, Regulasi, Sikap Birokrat/ Aparatur Pemerintah, Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9/8 Tahun 2006*. 26(3), 117–131. <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i3.1269>
- Fidiyani, R. (2016). Dinamika pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas di Jawa Tengah. *Jurnal Unisbank*, 501–510.
- Foundation, W. (2017). *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2017*.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). *Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*. 1–13.

- Hidayah, N. A., Hutagalung, S. S., Hermawan, D., Ilmu, F., Lampung, U., Februari, D., April, D., Juni, D., & Pringsewu, K. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Peran stakeholder dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangun. *Jurnal Administrasi Publik*, 7, 55–71.
- Hutabarat, B. A. (2017). Evaluasi terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41>
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99. <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu* (2nd ed.). Gava Media.
- Nugroho, H. N., Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari.*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation ). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(2), 105–124.
- Oktavia, S., & Saharuddin. (2015). Hubungan Peran Stakeholders Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 231–246. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9407>
- Pangestu, O. S. (2013). Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukun. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Putri, N. S. (2011). PELAKSANAAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA ( EXTERNAL FREEDOM ) DIHUBUNGKAN IJIN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
- Sabara. (2018). Kasus-Kasus Pembangunan Rumah Ibadat Di Provinsi Sulawesi Utara Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Provinsi Sulawesi Utara. *Harmoni*, 9, 28–42.

Santoso, H., Harini Muntasib, E. K. ., Kartodihardjo, H., & Soekmadi, R. (2015). Peranan Dan Kebutuhan Pemangku Kepentingan Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 197–211.  
<https://doi.org/10.20886/jsek.2015.12.3.197-211>

Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2018). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Ilmu Sosial Fan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 9(2), 127–144.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan Ke). Sinar Grafika Offset.

Regulasi

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Internet

Ardian. *Warga Bojong Menteng Protes Tolak Alih Fungsi Rumah Jadi Gereja*. Akurat.co. <https://akurat.co/news/id-977454-read-warga-bojong-menteng-protes-tolak-alih-fungsi-rumah-jadi-gereja>. Dilihat pada 10 Maret 2021